

SUBSIDIARY ARRANGEMENT
between the
THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
and the
**GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**
relating to the
**WATER AND SANITATION POLICY AND
ACTION PLANNING FACILITY**
(WASPOLA Facility)

1. GENERAL

This Subsidiary Arrangement embodies understandings between the Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the Government of Australia (GOA) and is made pursuant to the terms of Article IV of the General Agreement on Development Cooperation (GADC) that came into force on 21 July 1999. The terms of the GADC apply to this Subsidiary Arrangement.

2. NAME OF FACILITY

The name of the Facility is **the Water and Sanitation Policy and Action Planning (WASPOLA) Facility** (hereinafter referred to as "the Facility").

3. COORDINATING AUTHORITIES

The Coordinating Authorities for the Subsidiary Arrangement relating to the Facility will be:

For the GOA:

The Australian Agency for International Development (AusAID) of the Department of Foreign Affairs and Trade.

PENGATURAN TAMBAHAN
antara
PEMERINTAH AUSTRALIA
dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
tentang
**FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
RENCANA KEGIATAN AIR MINUM DAN
PENYEKATAN LINGKUNGAN**
(Fasilitasi WASPOLA)

1. UMUM

Pengaturan Tambahan ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia (GOI) dengan Pemerintah Australia (GOA) dan dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal IV Perjanjian Umum tentang Kerjasama Pembangunan (GADC) yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1999. Ketentuan-ketentuan GADC berlaku bagi Pengaturan Tambahan ini.

2. NAMA FASILITASI

Nama Fasilitasi adalah **Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Fasilitasi WASPOLA)** (untuk selanjutnya disebut "Fasilitasi").

3. LEMBAGA KOORDINATOR

Lembaga-Lembaga Koordinator untuk Pengaturan Tambahan tentang Fasilitas ini adalah:

Untuk Pemerintah Australia:

Australian Agency for International Development (AusAID), Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.

For the GOI:

National Development Planning
Agency (BAPPENAS)

BAPPENAS will oversee the implementation of Government of Indonesia obligations by relevant institutions under this Subsidiary Arrangement.

4. DURATION OF FACILITY

The Facility will be implemented from July 2009 to May 31, 2013 unless an extension is agreed by both Coordinating Authorities.

5. FACILITY LOCATION

The Facility will have a primary focus at national level, however, it will also be directly involved in a broad range of pilot activities at sub-national level. The location of sub-national activities is not expected to have any particular geographic focus, but will be driven more by the need to capture relevant water supply and environmental sanitation (WSES) experiences where they exist, and the need to pilot new policies and approaches across a broad range of locations so that they provide an adequate basis for continued development of the national WSES framework. Activities that require fieldwork in Eastern Indonesia will however be particularly encouraged, where the opportunity exists.

6. FACILITY DESCRIPTION

6.1. FACILITY GOAL: to improve access for

Untuk Pemerintah Indonesia:

Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS)

BAPPENAS akan mengawasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Indonesia oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan Pengaturan Tambahan ini.

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN FASILITASI

Fasilitasi akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2009 sampai dengan 31 Mei 2013, kecuali jika terjadi perpanjangan jangka waktu yang disepakati oleh kedua Lembaga Koordinator.

5. LOKASI FASILITASI

Fasilitasi akan terfokus terutama di tingkat pusat, namun Fasilitasi juga akan dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan percontohan di tingkat daerah. Lokasi kegiatan di daerah diharapkan tidak akan terfokus pada wilayah geografis tertentu melainkan akan lebih didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan pengalaman yang relevan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung, dan kebutuhan untuk mengujicoba kebijakan dan pendekatan baru di berbagai lokasi sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengembangkan kerangka AMPL nasional yang berkelanjutan. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan yang memerlukan pekerjaan lapangan di Kawasan Indonesia Timur khususnya akan terdorong apabila ada kesempatan.

6. URAIAN FASILITASI

6.1 MAKSUD FASILITASI: meningkatkan

Indonesians, particularly the poor, to adequate and sustainable water supply and environmental sanitation services, contributing to increased economic growth.

6.2. FACILITY PURPOSE: to strengthen the capacity of GOI to guide development of the sector through establishment of a flexible facility that can support emerging needs relating to policy development, policy implementation, and sector management.

6.3. FACILITY COMPONENTS:

The Facility has three main delivery components aligned with core focus areas, and one Program Management component as follows:

- **Component 1 – Policy Development.** To develop WSES policies in response to evolving political, economic, social and technological context and best practice.
- **Component 2 -- Policy Implementation.** To develop improved systems and procedures for implementation of WSES policies.
- **Component 3 -- Sector Management.** To strengthen sector management functions, with emphasis on coordination and communication, knowledge management, human resource development and M&E.
- **Component 4 -- Program Management.** To effectively and efficiently manage the Program in a manner that is responsive to stakeholder needs.

Within each of the three focus areas a number of priority outputs have been identified. Specific activities to achieve the outputs will be identified during the course of implementation, screened against the Facility framework and specified selection guidelines.

akses bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, pada pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai dan berkelanjutan, sehingga mampu berkontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

6.2 TUJUAN FASILITASI: memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia untuk membimbing pengembangan sektor ini melalui pembentukan fasilitas yang fleksibel sehingga dapat mendukung kebutuhan yang muncul terkait dengan pengembangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sektor.

6.3 KOMPONEN FASILITASI:

Fasilitasi mempunyai tiga komponen penyelenggaraan utama yang diselaraskan dengan bidang fokus inti dan sebuah komponen Manajemen Program sebagai berikut:

- **Komponen 1 – Pengembangan Kebijakan.** Mengembangkan kebijakan AMPL sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan teknologi, serta praktik terbaik.
- **Komponen 2 – Pelaksanaan Kebijakan.** Mengembangkan sistem dan prosedur yang lebih baik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan AMPL.
- **Komponen 3 – Manajemen Sektor.** Memperkuat fungsi-fungsi manajemen sektor yang menekankan pada koordinasi dan komunikasi, pengelolaan pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia serta Monitoring dan Evaluasi (M&E).
- **Komponen 4 – Manajemen Program.** Secara efektif dan efisien mengelola Program yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam ketiga bidang fokus, sejumlah output prioritas telah diidentifikasi. Kegiatan-kegiatan yang spesifik untuk mencapai output

7. FACILITY MANAGEMENT STRUCTURE AND MECHANISMS

7.1. FACILITY STEERING COMMITTEE

The implementation of the Facility will be overseen by a three-person Facility Steering Committee (FSC) comprising one nominated representative each from the Government, the World Bank and AusAID.

The FSC will meet once in a year or as required, and will be responsible for:

- a) Providing strategic direction and oversight including reviewing the structure, function, funds disbursement and performance of the Facility and recommending necessary changes.
- b) Endorsing proposed Annual Strategic Plan.
- c) Considering and approving proposals and funding requests over US\$100,000 for Facility Funding.
- d) Ensuring alignment and collaboration with other Government and donor activities in the sector.

The Committee may also hold supplementary meetings as appropriate for briefings or to consider urgent issues arising.

All FSC decisions will be taken on the basis of consensus.

7.2. THE FACILITY TECHNICAL TEAM

The Facility Technical Team, consisting of the inter-agency Echelon 2 WSES Technical Teams,

akan diidentifikasi selama pelaksanaan dan akan disaring sesuai dengan kerangka kerja Fasilitas dan pedoman penyeleksian yang ditetapkan.

7. STRUKTUR DAN MEKANISME MANAJEMEN FASILITASI

7.1. TIM PENGARAH FASILITASI

Pelaksanaan Fasilitasi akan diawasi oleh sebuah Tim Pengarah Fasilitasi (FSC) yang beranggotakan tiga orang yang masing-masing mewakili Pemerintah Indonesia, Bank Dunia dan AusAID.

FSC akan mengadakan rapat setiap tahun atau sesuai kebutuhan, dan bertanggung jawab untuk:

- a) Memberikan arahan strategis dan pengawasan termasuk meninjau struktur, fungsi, pencairan dana dan kinerja Fasilitas dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang diperlukan.
- b) Menyetujui Rencana Strategis Tahunan yang diusulkan.
- c) Mempertimbangkan dan menyetujui proposal dan permintaan pendanaan yang bernilai di atas US\$100.000 untuk Pendanaan Fasilitas.
- d) Memastikan penyelarasan dan kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah dan donor lainnya di sektor ini.

Tim Pengarah juga dapat mengadakan rapat-rapat tambahan sesuai kebutuhan untuk mendiskusikan isu-isu mendesak.

Semua keputusan FSC ditetapkan secara mufakat.

7.2 TIM TEKNIS FASILITASI

Tim Teknis Fasilitasi, yang beranggotakan gabungan Tim Teknis Pembangunan Air

established by BAPPENAS will be responsible for the management and implementation of the Facility as assisted on a day-to-day basis by the inter-agency Echelon 3 National Water and Sanitation Working Group (National WSES Working Group or the Pokja Nasional AMPL).

The Facility Technical Team will comprise senior representation from BAPPENAS (Chair); together with senior representation from all relevant Implementing Agencies, currently including Ministry of Public Works (MPW), Ministry of Health (MoH), Ministry of Home Affairs (MoHA), State Ministry of the Environment (MoE) and Ministry of National Education (MoNE).

BAPPENAS will play a coordination role in the Technical Team and National WSES Working Groups. As the chair it will ensure wide consultation with other GOI agencies on Facility activities and management and lead in the development of the Annual Strategic Plans and the Annual Monitoring and Evaluation Reports with technical input and assistance from the WASPOLA Facility Consultant Team.

WASPOLA Facility Technical Team may endorse an Activity Proposal and funding requests below US\$100,000 which meets the goals and objectives, annual priorities and rationale, sector and donor linkages and alignment.

7.3. GOI

BAPPENAS as the GOI Coordinating Authority will:

- a) make available appropriate staff to enable

Minum dan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi Eselon-2 antar-lembaga, yang dibentuk oleh BAPPENAS bertanggung jawab atas manajemen dan pelaksanaan Fasilitas yang dalam menjalankan tugas hariannya dibantu oleh Kelompok Kerja Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja Nasional AMPL) Eselon-3.

Tim Teknis Fasilitas terdiri dari perwakilan senior BAPPENAS (Ketua); serta pejabat senior sebagai perwakilan dari semua Lembaga Pelaksana yang relevan, yang saat ini terdiri dari Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU), Departemen Kesehatan (Depkes), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

BAPPENAS akan berperan sebagai koordinator dalam Tim Teknis dan Kelompok Kerja Nasional AMPL. Sebagai koordinator, BAPPENAS akan memastikan konsultasi dengan departemen atau kementerian lembaga lainnya mengenai kegiatan dan manajemen Fasilitas serta memimpin penyusunan Rencana Strategis Tahunan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahunan berdasarkan masukan dan bantuan teknis dari Tim Konsultan Fasilitas WASPOLA.

Tim Teknis Fasilitas WASPOLA dapat menyetujui Proposal Kegiatan dan permintaan pendanaan senilai kurang dari US\$ 100.000, yang sesuai dengan maksud dan tujuan Fasilitas, prioritas dan tujuan tahunan, serta hubungan dan penyalarsan antar sektor maupun dengan lembaga donor.

7.3 PEMERINTAH INDONESIA

BAPPENAS sebagai Koordinator Pemerintah Indonesia akan:

- a) Menyediakan staf yang berkompeten

the smooth implementation of the Facility and will participate fully in Facility activities. b) be responsible for performing secretariat duties, including liaising with other National WSES Working Group members to determine a suitable date and time for the meetings, issuing invitations and the meeting agenda in a timely way, taking the Minutes of the Meeting and distributing the Minutes of the Meeting to all participants for comments in a timely fashion. GOI will meet all costs associated with participation of GOI staff in Facility activities, including salaries and normal operational costs. GOI will acknowledge GOA partnership and funding support to this project in all stakeholder and public meetings. GOI contributions will include, but not be limited to, the provision of: a) support for various on-going sector management activities such as the WSES publications and WSES website. b) In-kind contribution for the implementation of activities, particularly staff time and general operating costs. c) a principal contact who will be responsible for ensuring the agency meets its oversight obligations. 7.4. GOA AusAID as the GOA Coordinating Authority will	untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Fasilitas dan berpartisipasi penuh dalam kegiatan-kegiatan Fasilitas. b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas sekretariat, termasuk menjalin koordinasi dengan anggota Pokja Nasional AMPL untuk menetapkan tanggal dan waktu rapat, mengeluarkan surat undangan dan agenda rapat secara tepat waktu, menyusun dan mendistribusikan Notulen Rapat kepada semua peserta untuk mendapatkan komentar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia akan menanggung semua biaya terkait dengan partisipasi staf Pemerintah Indonesia dalam kegiatan-kegiatan Fasilitas, termasuk gaji dan biaya operasional normal. Pemerintah Indonesia mengakui kemitraan dan dukungan pendanaan Pemerintah Australia bagi proyek ini dalam semua rapat pemangku kepentingan dan rapat yang terbuka bagi publik. Kontribusi Pemerintah Indonesia akan termasuk penyediaan beberapa hal dibawah ini, tetapi tidak terbatas pada,: a) Dukungan berbagai kegiatan manajemen sektor yang sedang berlangsung seperti publikasi AMPL dan website AMPL. b) Kontribusi non-uang untuk pelaksanaan kegiatan, khususnya waktu staf dan biaya operasional secara umum. c) Kontak utama yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa BAPPENAS menjalankan kewajibannya 7.4. PEMERINTAH AUSTRALIA AusAID sebagai Koordinator Pemerintah
--	---

designate representatives to work with the WASPOLA Facility Consultant Team and Government Working Groups. Through the Facility Steering Committee it will monitor and assess the performance of the Facility and WSP-EAP; exercise financial oversight, including through the right of final approval of detailed activity designs, expenditure budgets and procurement decisions..

7.5. THE WORLD BANK

AusAID has engaged the World Bank's Water and Sanitation Program East Asia and the Pacific (WSP-EAP) to support the Facility implementation on GOA's behalf. The WSP-EAP has established the WASPOLA Facility Consultant Team to support the Facility Technical Team in its technical and managerial guidance role.

The WASPOLA Facility Consultant Team will play a central role in assisting the National WSES Working group and implementing agencies in identifying activities for funding, formulating and pre-screening proposals, and assisting the Facility Technical Team in preparing Annual Strategic Plans and proposals over US\$100.000 for endorsement by the FSC.

7.6. ACTIVITIES AND WORKPLANS

Activity Proposals will be evaluated against agreed upon criteria following the World Bank and Government rules and regulations. Managing the implementation of Facility-funded activities will be delegated to concerned implementing agencies under the guidance of the Facility Technical Team and with assistance of the WASPOLA Facility Consultant Team.

Australia akan menugaskan perwakilannya untuk bekerja bersama Tim Konsultan Fasilitas WASPOLA dan Kelompok Kerja Pemerintah Indonesia. Melalui Tim Pengarah, AusAID akan memonitor dan menilai kinerja Fasilitas dan WSP-EAP; melaksanakan pengawasan keuangan, termasuk pemberian persetujuan terakhir atas desain kegiatan yang terperinci, anggaran belanja dan keputusan pengadaan barang/jasa.

7.5. BANK DUNIA

AusAID telah melibatkan Program Air Minum dan Sanitasi Kawasan Asia Timur dan Pasifik (WSP-EAP) Bank Dunia untuk mendukung pelaksanaan Fasilitas atas nama Pemerintah Australia. WSP-EAP telah membentuk Tim Konsultan Fasilitas WASPOLA untuk mendukung Tim Teknis dalam teknis pelaksanaan maupun manajerial.

Tim Konsultan Fasilitas WASPOLA akan memainkan peranan penting dalam membantu Pokja Nasional AMPL dan lembaga-lembaga pelaksana dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan didanai, merumuskan dan melakukan seleksi awal terhadap proposal yang diajukan, dan membantu Tim Teknis dalam menyusun Rencana Strategis Tahunan dan proposal-proposal di atas US\$100.000 untuk disetujui oleh FSC.

7.6. KEGIATAN DAN RENCANA KERJA

Proposal Kegiatan akan dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah disepakati berdasarkan peraturan dan ketentuan Bank Dunia dan Pemerintah. Pengelolaan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Fasilitas akan didelegasikan kepada lembaga pelaksana bersangkutan di bawah bimbingan Tim Teknis Fasilitas dan dibantu oleh Tim Konsultan Fasilitas WASPOLA.

Annual Strategic Plans will be prepared by the Facility Consultant Team in collaboration with the Facility Technical Team and implementing agencies of approved proposals.

Annual Strategic Plans will be submitted to the Facility Steering Committee for approval. At a minimum, the Annual Strategic Plans will identify major priority areas to be addressed by the Facility over the coming year together with budget allocations between core focus areas and Implementing Agencies, indicative activities, expected achievements, performance indicators to measure tangible achievements, and an assessment of risks.

7.7. REPORTING

The WASPOLA Facility Consultant Team will be responsible for preparing the monthly, six-monthly progress reports, quarterly financial reports and Annual M&E reports for review by the Facility Technical Team and the Facility Steering Committee.

Implementing Agencies that initially includes Ministry of Public Works (MPW), Ministry of Health (MoH), Ministry of Home Affairs (MoHA), State Ministry of the Environment (MoE) and Ministry of National Education (MoNE).will be responsible for preparing progress report during activity implementation and activity completion report after the completion of a funded activity.

WSP-EAP will be responsible for preparing annual reports and a final facility evaluation report at the end of the implementation period for submission to AusAID.

Rencana Strategis Tahunan atas proposal yang telah disetujui akan disusun oleh Tim Konsultan Fasilitasi WASPOLA bekerja sama dengan Tim Teknis Fasilitasi dan lembaga-lembaga pelaksana.

Rencana Strategis Tahunan akan diajukan kepada Tim Pengarah Fasilitasi untuk mendapatkan persetujuan. Sekurang-kurangnya, Rencana Strategis Tahunan akan mengidentifikasi bidang-bidang prioritas utama yang akan menjadi fokus oleh Fasilitasi selama tahun mendatang yang dilengkapi dengan alokasi anggaran bidang fokus inti maupun Lembaga Pelaksana, indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan, pencapaian yang diharapkan, indikator kinerja untuk mengukur pencapaian , dan penilaian risiko.

7.7. PELAPORAN

Tim Konsultan Fasilitasi WASPOLA bertanggung jawab untuk menyusun laporan kemajuan bulanan dan enam bulanan, laporan keuangan triwulan dan laporan M&E tahunan untuk ditinjau oleh Tim Teknis Fasilitasi dan Tim Pengarah Fasilitasi.

Lembaga-Lembaga Pelaksana yang saat ini terdiri dari Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU), Departemen Kesehatan (Depkes), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bertanggung jawab untuk menyusun laporan kemajuan selama pelaksanaan kegiatan dan laporan penyelesaian kegiatan setelah selesainya kegiatan yang didanai.

WSP-EAP bertanggung jawab untuk menyusun laporan tahunan dan laporan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Fasilitas pada saat berakhirnya periode pelaksanaan untuk diajukan kepada AusAID.

8. FINANCIAL CONTRIBUTIONS

The total GOA financial contribution to the Facility will be up to AUD10,000,000 (Ten Million Australian Dollars) from 1 June 2009 to 30 June 2011 and is paid to the World Bank Trust Fund. GOA funds can be utilized until the closing date of the Facility, estimated to be 31 May 2013. The payment of these funds into the World Bank Trust Fund will be subject to Australian annual parliamentary approval of appropriations.

The Facility will start off financing primarily Bank-executed activities in year 1, and will gradually move towards financing recipient-executed proposals over the 4 year implementation.

GOA contribution to the Bank-executed activities will finance the WASPOLA Facility Consultant Team including staff salaries, short and extended-term consultants, contractual services, temporary staff cost, Facility supervision activities, media and workshops, conferences, meetings, equipment, travel expenses, communications and translation.

GOA contributions to recipient-executed component will finance activities to assist executing and implementing agencies in developing and putting into operation policy frameworks, strategic plans, monitoring and evaluation systems, medium term development plans for water and sanitation services, goods, services, media, workshops,

8. KONTRIBUSI FINANSIAL

Total kontribusi finansial Pemerintah Australia untuk mendanai Fasilitas mencapai AUD 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Australia) dari 1 Juni 2009 sampai 30 Juni 2011, dan dibayar kepada Dana Perwalian Bank Dunia . Dana dari Pemerintah Australia tersebut dapat dimanfaatkan sampai tanggal berakhirnya Fasilitas yang diperkirakan tanggal 31 Mei 2013. Pembayaran dana tersebut ke Dana Perwalian Bank Dunia harus mendapatkan persetujuan setiap tahun dari parlemen Australia atas pengalokasiannya.

Fasilitas akan mulai membiayai terutama kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bank Dunia (*Bank-executed*) pada tahun pertama, dan selanjutnya akan secara bertahap membiayai proposal-proposal yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan (*recipient-executed*) selama pelaksanaan 4 tahun.

Kontribusi dari Pemerintah Australia untuk komponen kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bank Dunia akan digunakan untuk membiayai Tim Konsultan Fasilitas WASPOLA termasuk gaji karyawan, konsultan jangka pendek maupun yang lebih panjang, jasa kontrak, biaya staf sementara, kegiatan pengawasan , media dan pelaksanaan lokakarya, konferensi, pertemuan, peralatan, biaya perjalanan, komunikasi dan terjemahan.

Kontribusi Pemerintah Australia untuk komponen kegiatan yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan guna membantu lembaga penanggung jawab dan lembaga pelaksana dalam mengembangkan dan melaksanakan kerangka kebijakan, rencana strategis, sistem monitoring dan

conferences, meetings, and incremental operating costs.

For all recipient-executed activities, GOI will adhere to the World Bank's standard procurement rules in order to ensure that open and fair competition occurs

9. MONITORING AND EVALUATION

The Monitoring and Evaluation Framework will have three focus areas:

- a) On-going M&E: this will be conducted by WSP-EAP and the Facility Technical Team to monitor progress on the overall program performance including compliance with established procedures; progress against workplans and budgets; overall quality of implementation; and efficiency of soliciting, processing and supporting activity requests.
- b) Independent Performance Review: to be conducted by AusAID at the end of Program Year 1 and at the end of Program Year 2. The first review will focus mainly on management performance with particular emphasis on procurement performance. The second review will cover both management and technical performance and will provide the basis for refining future direction of the Facility and guidance for AusAID future support.
- c) Impact Evaluation: to be carried out by AusAID at the end of the program. The Evaluation will include analysis of the

evaluasi, rencana pembangunan jangka menengah untuk pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, penyediaan barang dan jasa, media, lokakarya, konferensi, pertemuan dan tambahan biaya operasional.

Untuk semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan, Pemerintah Indonesia akan mengikuti standard ketentuan pengadaan Bank Dunia untuk memastikan terjadinya persaingan yang terbuka dan adil.

9. MONITORING DAN EVALUASI

Kerangka Monitoring dan Evaluasi mempunyai tiga kegiatan fokus:

- a) M&E secara Berkelanjutan: kegiatan ini dilaksanakan oleh WSP-EAP dan Tim Teknis Fasilitasi untuk memonitor kemajuan kinerja program secara keseluruhan termasuk ketaatan terhadap prosedur yang ditetapkan; kemajuan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran; kualitas pelaksanaan secara keseluruhan; dan efisiensi dalam mengumpulkan, memproses dan mendukung permohonan kegiatan.
- b) Review Kinerja Independen: akan dilaksanakan oleh AusAID pada saat berakhirnya Program Tahun ke-1 dan Program Tahun ke-2. Review pertama akan berfokus pada kinerja manajemen terutama yang menekankan pada kinerja pengadaan. Review kedua akan mencakup kinerja manajemen maupun teknis sehingga menjadi dasar untuk penyempurnaan arah kebijakan Fasilitasi di masa mendatang dan menjadi pedoman bagi dukungan AusAID di masa mendatang.
- c) Evaluasi Dampak: akan dilaksanakan oleh AusAID pada saat berakhirnya program. Evaluasi ini mencakup analisis

Annual Strategic Plans and Comprehensive Annual M&E Reports to assess what impacts have been achieved and how well lessons-learned have been applied.

terhadap Rencana Strategis Tahunan dan Laporan M&E Tahunan secara Menyeluruh untuk menilai dampak yang telah dicapai dan seberapa jauh pelajaran yang diperoleh telah diterapkan.

10. INTELLECTUAL PROPERTY

Pursuant to Paragraph 1 of Article VII of the GADC, the parties have decided that any Intellectual Property issues that might arise during the execution of the Facility will be addressed in an Implementing Arrangement in accordance with Article VII.

10. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berdasarkan Ayat 1, Pasal VII GADC, para pihak telah memutuskan bahwa segala permasalahan Kekayaan Intelektual yang mungkin timbul selama pelaksanaan Fasilitas akan diselesaikan dalam sebuah Pengaturan Pelaksanaan sesuai dengan Pasal VII.

11. LACK OF TREATY STATUS

This Subsidiary Arrangement serves only as a record of the intentions of the GOA and the GOI and does not constitute or create (and is not intended to create) rights or obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable rights or obligations (expressed or implied). Consequently, any dispute, controversy or claim which arises out of the interpretation or application of this Subsidiary Arrangement will not be subject to adjudication or arbitration but will instead be dealt with through amicable consultations and negotiations as the only method of achieving the peaceful settlement of that dispute, controversy, or claim.

11. TIDAK BERSIFAT PERJANJIAN

Pengaturan Tambahan ini hanya merupakan sebagai catatan terhadap niat Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dan bukan merupakan atau tidak menciptakan (dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan) hak atau kewajiban berdasarkan hukum domestik maupun internasional dan tidak menyebabkan proses hukum apapun dan tidak akan dianggap merupakan atau menciptakan hak atau kewajiban apapun yang mengikat atau dapat diberlakukan secara hukum (yang dinyatakan ataupun tersirat). Oleh karena itu, setiap perselisihan, kontroversi atau tuntutan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Pengaturan Tambahan ini tidak dapat dibawa ke pengadilan atau arbitrase melainkan akan diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan damai sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan, kontroversi atau tuntutan tersebut secara damai.

12. AMENDMENTS TO THE SUBSIDIARY ARRANGEMENTS

This Subsidiary Arrangement may be amended at any time by written arrangement of the

12. PERUBAHAN PENGATURAN TAMBAHAN

Pengaturan Tambahan ini dapat diubah setiap waktu melalui kesepakatan bersama

Parties.

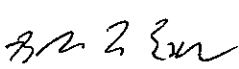
IN WITNESS THEREOF, the undersigned have signed this Subsidiary Arrangement.

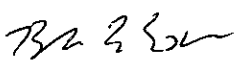
Signed in duplicate, at Jakarta, on this day of 5 in the year of two thousand and nine, in 2 (two) originals in English language and Bahasa Indonesia, both of the texts being equally authentic.

secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya.

DEMIKIANLAH, para pihak yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Pengaturan Tambahan ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua, di Jakarta, pada hari ini tanggal 5 tahun dua ribu sembilan, keduanya asli dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang sama bunyinya.

FOR THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
	 15
Blair Exell Minister-Counsellor AusAID	Dr Ir Dedy Supriadi Priatna Deputy for Infrastructure BAPPENAS

UNTUK PEMERINTAH AUSTRALIA	UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
	 15
Blair Exell Minister-Counsellor AusAID	Dr Ir Dedy Supriadi Priatna Deputi Bidang Sarana dan Prasarana BAPPENAS